

Karangasem Lobi Pusat Buat Dermaga Baru



RAMAI: Dermaga rakyat di Padangbai ini akan mendapat saingan dermaga penyeberangan di Tulamben, Kubu.

Untuk Penyeberangan ke Lombok Utara

AMLAPURA - Pemkab Karangasem, sudah menjalin kerjasama dengan Kabupaten Lombok Utara (KLU), Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait dunia pariwisata. Salah satu bentuknya, Karangasem ingin membuat dermaga baru di Tulamben, Kubu untuk penyeberangan langsung ke Lombok Utara. Bahkan, saat ini pejabat Karangasem masih melakukan lobi-lobi ke pusat.

Sekda Karangasem, I Gede Adnya Mulyadi mengatakan, untuk memuluskan rencana membuat dermaga tandingan, Pemkab Karangasem sudah aktif melakukan pendekatan ke pemerintah pusat. Dengan harapan, pembangunan dermaga rakyat di dua daerah tersebut, bisa dibantu pemerintah pusat. Kepala Dinas Perhubungan Pemadam Kebakaran Pemkab Klungkung, I Wayan Sutapa, diakui Adnya Mulyadi, semakin gencar melakukan lobi ke Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal.

"Sekarang (Senin, kemarin) Kadis

Perhubungan, masih berada di Jakarta, melakukan lobi-lobi," tegasnya.

Sekda Karangasem, I Gede Adnya Mulyadi mengatakan, dengan adanya dermaga baru dari Karangasem ke Lombok Utara, maka wisatawan yang ada di Bali akan lebih mudah untuk berkunjung ke Lombok, khususnya Lombok Utara yang memiliki tujuan wisata terkenal yakni Gili Terawangan, Gili Meno dan Gili Air. Adanya aktivitas ini, secara tidak langsung juga akan menjadi sumber pemasukan bagi Pemkab Karangasem.

Disinggung kesan dermaga baru ini akan menjadi saingan bagi dermaga rakyat di Padangbai, Adnya Mulyadi menampik. Kata dia, dermaga rakyat yang akan dikelola pemerintah itu, direncanakan dibangun di wilayah objek wisata Tulamben, Kecamatan Kubu, dan memanfaatkan dermaga cruise Tanah Ampo di Kecamatan Manggis. Jika dermaga yang dikelola pemerintah itu jalan, maka wisatawan yang saat musim liburan bisa mencapai 1.200 orang per hari, menyeberang Lombok melalui dermaga rakyat Padangbai, bisa terpecah. "Bagaimana ya, kalau dibilang berebut, *ya* tidak juga," bantah Adnya Mulyadi, lalu terkekeh, ketika dihubungi Senin (30/3).

Kembali disinggung soal upaya berebut wisatawan dengan Desa Adat Padangbai, Sekda asal Bebandem itu, menegaskan, ketika rencana itu mulus, maka akan diupayakan kerjasama, bersinergi dengan Desa Adat Padangbai. "Kami juga tidak ingin mematikan, atau berebut pendapatan masyarakat. Makanya, akan dirumuskan seperti apa kerjasama itu," pungkasnya. (wan/yor)

Edisi : Selasa, 31 Maret 2015

Hal : $\frac{2}{}$



KASUS ART CENTER

Suastika-Mantara Metempo Seminggu

DENPASAR - Dua terpidana kasus dugaan korupsi Art Center gagal dijebloskan ke penjara, Senin (30/3). Sebab, sebab mantan Kadisbud Bali Ketut Suastika dan bekas Kepala UPT Art Center, Ketut Mantara Gandi *metempo* (minta waktu) selama seminggu untuk dieksekusi. Alasannya, ada upacara agama. Mereka mengaku siap dieksekusi Senin mendatang (6/4).

Sejatinya proses eksekusi sudah berjalan kemarin. Bahkan pukul 10.00, awak media sudah sangat ramai di Kejari Denpasar ■

▶ Baca Suastika... Hal 31

Harus Datang tanpa Dipanggil

SUASTIKA...

Sambungan dari hal 21

Ternyata pukul 11.30, tim Jaksa Kejati Made Tangkas dan lainnya sudah di Kejari Denpasar. Namun pihak terpidana Suastika dan Mantara Gandi tidak muncul. Akhirnya yang datang pengacaranya saja, Ketut Ngastawa dan Haposan Sihombing.

Mereka naik ke lantai dua, namun setelah turun memberikan penjelasan. "Kami menyampaikan permohonan penangguhan selama satu minggu," jelas Ngastawa. Dia menyampaikan alasan, yang pertama Suastika ada upacara besar di desanya Desa Rijasa Tabanan. "Beliau pengarep (laki – laki) satu satunya, sehingga memohon agar bisa menjalani upacara itu yang akan terlaksana pada tanggal 3 April ini," ungkap Ngastawa.

Sedangkan Mantara Gandi, iparnya meninggal dan menjalani proses ngaben pada Senin kemarin. "Mantara, iparnya meninggal, ngabennya hari ini (kemarin) di Angantaka, Badung," imbuhnya.

Atas kondisi ini dua orang ini memohon agar bisa menjalani eksekusi pada Senin (6/4) nanti. "Sudah pasti satu minggu lagi mereka akan siap hadir untuk menjalani eksekusi," urainya.

Dikonfirmasikan ke Jaksa Made Tangkas, membenarkan kondisi ini. Bahkan pihak kejaksaan su-



MINTA
PENANGGUHAN:
Haposan
Sihornbing (kiri)
dan Ketut Ngastawa
menunjukkan
surat permohonan
penangguhan eksekusi
terpiciana kasus
korupsi Art Center
di Ke ari Denpasar,
kemarin.

dah mengabulkan permohonan itu. "Ini masalah kemanusiaan, kami berikan waktu. Namun minggu depan mesti datang tanpa dipanggil," ungkapnya. Kok ada kesan diistimewakan? "Saya kira tidak ada diistimewakan, mereka siap nanti menjalani hukuman," pungkasnya.

Seperti halnya berita sebelumnya, duo Art Center ini dipanggil kemarin untuk menjalani eksekusi seperti vonis hakim. Dua terpidana akan menjalani hukuman sesuai vonis hakim. Sebelumnya terdakwa Suastika divonis 14 bulan atau 1 tahun 2 bulan dan Mantara Gandi divonis lebih rendah yaitu 13 bulan atau 1 tahun 1 bulan.

Dalam vonis hakim disampajkan bahwa terdakwa terbukti bersalah, melanggar pasal 3 ayat 1 jo pasal 18 Undang – undang nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan undang – undang nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Akhirnya Hakim memvonis Suatika dengan hukuman 1 tahun 2 bulan, dengan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan. Hukuman ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yaitu 1 tahun 6 bulan atau 1,5 tahun. Sedangkan dendanya sama Rp 100 juta, namun subsidernya dalam tuntutan 6 bulan.

Sedangkan untuk Mantara Gandi hakim memvonis I tahun 1 bulan atau 13 bulan. Dengan denda Rp 50 juta subsider I bulan. Jika tidak membayar denda bertambah 1 bulan hukumannya. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa, yaitu dituntut 1,5 tahun dan Rp 50 juta subsider 3 bulan. Dua terdakwa sebelumnya sudah mengembalikan kerugian negara.

Kasus ini berawal dugaan korupsi pengadaan lighting dan sound system di Art Center. Dengan kerugian negara Rp Rp 812.135.337 atau (Rp 812 juta lebih). (art/yes)

Edisi

Selasa, 31 Maret 2015

Hal

21 day 31.



Pemkot Pro BPD Daripada Rakyat

ANGGOTA DPRD Kota Denpasar AA Susruta Ngurah Putra menuding Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar lebih sayang Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali daripada rakyatnya. Indikasinya, dana untuk perbaikan infrastruktur sekitar Rp 45 miliar untuk perbaikan jalan raya. Sedangkan untuk penyertaan modal di BPD Bali Pemkot menganggarkan Rp 60 miliar. "Inilah kemudian yang saya anggap menyusahkan masyarakat. Kalau membela masalah hak rakyat pemerintah seolah tutup mata, namun masalah penyertaan modal justru besar. Harus rakyat yang didahului," sesal Susruta, kemarin.

Sayang, , Kabag Humas dan Protokoler Pemkot Denpasar IB *Rahoela* ketika dihubungi koran ini melalui sambungan telepon terkait mengenai hal tersebut, justru tidak ada jawaban, dua kali ditelepon pun tidak ada jawaban padahal terdengar nada sambung. **(hen/djo)**

Edisi : Selasa, 31 Maret 2015

Hal : _____



VAR KOSONG

Dewan Panggil Diskes dan ULP

NEGARA - Komisi C DPRD Jembrana memanggil dinas kesehatan (Diskes) dan unit pelayanan lelang (ULP) Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk meminta penjelasan terkait kekosongan vaksin anti rabies (VAR) dan penjelasan lebih lanjut pada warga yang sudah digigit anjing rabies.

Diskes dan ULP akan dipanggil Komisi C DPRD Jembrana, dijadwalkan hari ini (31/3) di ruang rapat kerja DPRD
Jembrana. Ketua Komisi C DPRD Jembrana, Ida Bagus
Susrama mengatakan, fokus pemanggilan Diskes dan ULP
hari ini untuk rapat kerja terkait kasus gigitan anjing yang
suspect rabies. Disisi lain VAR di Jembrana kosong. "Ini
harus segera dicarikan solusi sebelum ada korban jiwa,"
ujarnya ditemui di ruang kerjanya kemarin (30/3).

ujarnya ditemui di ruang kerjanya kemarin (30/3).

Pengadaan VAR harus segera dilakukan karena menyangkut nyawa masyarakat. Diskes harus mengambil langkah cepat dengan melakukan pengadaan VAR. Salah satunya dengan anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Meski pengadaan masih bermasalah di e-katalog, hal itu bisa dilakukan dengan alasan darurat. Terpenting saat ini adalah pengawasan terhadap warga yang sudah digigit anjing suspect rabies. Para korban yang saat ini sudah ada 10 orang suspect tertular rabies harus mendapat pengawasan ketat dari Diskes dan harus dipastikan mereka sudah dapat VAR. Seperti diberitakan sebelumya, sebanyak 10 orang warga Desa Tuakdaya digigit anjing yang suspect rabies. (bas/gup)

Edisi : Selasa, 31 Maret 2015

Hal : 29



DPRD Rekomendasi

LKPJ-AMJ Bupati Badung



HUMAS PEMKAB BADUNG FOR RADAR BAL

HARMONIS: Rapat Paripurna Istimewa DPRD Badung, di Ruang Utama Gosana, Senin kemarin (30/3).

MANGUPURA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung memberikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun Anggaran 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Badung 2010-2015. Rekomendasi ini dituangkan dalam Keputusan DPRD Badung 11/2015 tentang Rekomendasi atas LKPJ Bupati Badung 2014 dan Keputusan DPRD Badung 12/2015 tentang Rekomendasi atas LKPJ AMJ Bupati Badung 2010-2015.

Hal terşebut terungkap saat Rapat Paripurna Istimewa DPRD Badung, di Ruang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung, Puspem Badung, Senin kemarin (30/3). Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Nyoman Giri Prasta, dihadiri Bupati Badung AA Gde Agung, Wabup I Made Sudiana, Wakil Ketua dan anggota DPRD Badung, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Badung dan Pimpinan SKPD Badung.

Rekomendasi DPRD Badung disampaikan Wakil Ketua DPRD Badung I Ketut Suiasa. Memuat catatan strategis, berisi saran terhadap arah kebijakan umum pemerintahan daerah. Juga pengelolaan keuangan daerah, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas perbantuan dan penyelenggaraan tugas umum Pemkab Badung. Dilanjutkan penandatanganan berita acara serah terima rekomendasi Dewan oleh pimpinan DPRD Badung dan Bupati Badung.

Bupati Badung AA Gde Agung menyampaikan catatan kritis dan strategis Dewan dalam rekomendasi itu cerminkan komprehensip pencermatan dan penilaian Dewan terhadap kinerja Bupati beserta jajarannya. Khususnya dalam mengemban amanat masyarakat selama 2010-2015. Bupati dapat menyimak bahwa terdapat capaian kemajuan ekonomi yang diapresiasi Dewan. "Capaian tersebut ibarat hasil harmonisasi sebuah orkestra yang masing-masing orang di

dalamnya melaksanakan fungsi dan peranannya masing-masing. Namun, tetap menghasilkan komposisi simponi yang harmonis," jelas Gde Agung.

Kata Bupati, capaian itu merupakan buah kerja keras seluruh jajaran Pemkab Badung. Mulai bupati, kepala SKPD, camat, perbekel/lurah,

hingga jajaran terdepan. Di dalamnya, ada kepala lingkungan dan kelian banjar, dan jajaran pimpinan daerah Badung.

Bupati mencontohkan capaian di sektor budaya tak dapat dilepaskan dari peranan dan kontribusi sekaa teruna, penggerak PKK, karang taruna, sekaa kesenian, sekaa subak, para pemangku dan sulinggih. Termasuk tokoh-tokoh umat beragama di Badung. Sementara capaian di sektor ekonomi hasil kerja keras perajin, pedagang, dan pengusaha. Mulai dari skala kecil, menengah, maupun besar. (adv/san/djo)

Edisi : Selasa, 31 Maret 2015

Hal : 24



Kejari Tak Dapat Hasil



TAK MAU BERI DATA: Kasubag Bantuan Humum Bagian Hukum Pemkot Denpasa Komang Lestari Kusuma yang menerima tim Kejari tak mau memberikan data yang diminta karena belum mendapat izin dari Sekkot Rai Iswara.





Berbelit - belit.
Alasannya banyak. Namun kami
ada cara untuk
menangani yang
seperti ini."

Immanuel Zebua Kajari Denpasar



Memang ada temuan (BPK RI, Red), namun bukan saya membidangi," jelasnya.

Made Pasek Mandira Kabag Umum Pemkot Denpasar



hal·1

Edisi

Selasa, 31 Maret 2015

Hal

21 dan 31.



Sambungan

Saat Obok-obok Pemkot Denpasar

DENPASAR - Tim Kejari Denpasar dipimpin oleh Kasi Intel Syahrir Sagir mendatangi Pemkot, Senin (30/3). Sayang, tim yang sedang mendalami temuan BPK RI tersebut pulang dengan tangan kosong. Sebab, mereka tidak mendapatkan data-data yang diinginkan. Selain itu, para pejabat yang dicari juga tidak ada di tempat.

Sekitar pukul 11.30, Jawa Pos Radar Bali mendapatkan info bahwa tim Kejari Denpasar sudah meluncur ke Pemkot. Akhirnya setelah didalami info ini memang benar. Tim yang dipimpin Syahrir Sagir sudah meluncur ke Pemkot Denpasar. Setelah disambangi ke Pemkot Denpasar. Setelah disambangi ke Pemkot Denpasar, seperti biasa masih banyak pihak yang berkelit. "Saya sih tidak dengar ada pihak Kejari ke sini (Pemkot)," ungkap salah satu Kasubag di Humas dan Protokol Pemkot Denpasar ®

Baca Kejari... Hal 31

TAK MAU BERI DATA: Kasubag Bantuan Humum Bagian Hukum Pemkot Denpasar Komang Lestari Kusuma yang menerima tim Kejari tak mau memberikan data yang diminta karena belum mendapat izin dari Sekkot Rai Iswara.



hal. 2

Edisi : Selasa, 31 Marel 2015

Hal : 21 dan 31



Sambungan

Kajari Sebut Pemkot Berbelit-belit

KEJARI...

Sambungan dari hal 21

Namun sumber di Kejari Denpasar mengatakan, ada tiga bagian yang disasar yaitu Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Hukum. Yang dibidik khusus mencari data kasus perjalanan dinas (perdin), dengan nilai Rp 32 miliar lebih.

Awalnya, tim Kejari masuk ke bagian Hukum. Ini terjadi lantaran Kabag Umum Mandira tidak ada di ruangan, Kabag Keuangan Made Widra juga dicari ternyata tidak ada di ruangan. Begitu juga Kabag Hukum Made Toya. Dia juga tak ada di ruangan. Kasi Intel Kejari Denpasar Syahrir Sagir menemui Kasubag Bantuan Humum Bagian Hukum Pemkot Denpasar Komang Lestari Kusuma.

Kepada koran ini, Komang Lestari Kusuma mengakui dirinya yang menerima Syahrir dkk. "Saya yang akhirnya menemui, lantaran Kabag - Kabag yang akan dicari tidak ada di tempat," ungkap Lestari.

Dia mengatakan memang kedatangan pihak Kejari untuk meminta data atas kasus dugaan penyimpangan atau korupsi atas temuan BPK RI. "Terkait temuan BPK RI, saya ditemui. Kabag Keuangan sedang di Pemprov dan Kabag Hukumnya di Jakarta," ungkapnya.

Anehnya lagi, tim Kejari sepertinya bisa "ditundukkan" di Pemkot Denpasar. Lantaran sama sekali tidak diberikan data, dengan alasan belum ada izin meminta data dari Sekkot Kota Denpasar Rai Iswara. "Kan mesti ada izin dari Pak Sekda (Sekkot), jadi kami kemarin tidak memberikan apa - apa," lanjutnya. Syahrir dkk pun pulang dengan tangan kosong.

Kajari Denpasar Immanuel Zebua ketika dikonfirmasi membenarkan timnya sudah turun. Terkait dengan adanya izin dari Sekkot Denpasar un-

tuk mendapatkan data, pihaknya akan merapatkan barisan dengan tim di Kejari. "Nanti kami bahas lagi, apa langkahlangkah yang akan kami ambil untuk kasus ini," ungkapnya.

Zebua sebelumnya mengatakan bahwa selama ini tim Kejari kerap sulit memeriksa orang Pemkot yang dipimpin oleh Rai Mantra - Jaya Negara ini.

"Berbelit - belit. Alasannya banyak. Namun kami ada cara untuk menangani yang seperti ini," ungkap Zebua sebelumnya.

Kabag Umum Made Pasek Mandira ketika hendak dikonfirmasi ternyata tidak ada di ruangan. "Ada apa Pak ramai-ramai, Bapak (Pasek Mandira, Red) tidak ada di ruangan dari pagi," ujar salah satu staf di Bagian Umum. Setelah ditunggu beberapa saat, muncul Kabag Umum Pemkot Denpasar Made Pasek Mandira. Dia awalnya mengatakan tidak tahu menahu. Namun setelah ditanyakan atas temuan BPK RI Wilayah Bali yang sedang didalami oleh Kejari Denpasar, Mandira mengaku tahu ada temuan. "Memang ada temuan (BPK RI, Red), namun bukan saya membidangi," jelasnya.

Dia mengatakan bahwa secara global semua SKPD, memang dana perjalanan dinas Pemkot Denpasar Rp 32,4 miliar lebih. Namun dia mengatakan peran Bagian Umum hanya menandatangani setelah pihak yang melakukan perjalanan dinas balik ke Denpasar. "Misalnya ada perjalanan dinas ke Jakarta, kemudian kembali. Saya tanda tangan, itu saja," ungkapnya.

Bahkan Mandira mengatakan dana perjalanan dinas di Sekretariat Pemkot Denpasar pos anggarannya ada di Bagian Humas dan Protokol. "Bukan di kami, namun di bagian Humas dan Protokol pos anggaran perjalanan dinas," sebutnya.

hal. 3

Edisi

: Selasa, 31 Maret 2015

Hal

21 dan 31



Sambungan

Saat itu, Dewa Rai merasa sebagai orang humas langsung berdalih bahwa semua sudah diselesaikan. "Temuan BPK itu sudah tidak ada masalah lagi, sudah dituntaskan," kilahnya.

Seperti berita sebelumnya, ada dugaan permainan perjalanan dinas Pemkot Denpasar. Sebab dari belanja perjalanan dinas (perdin) Rp 32.437.260.848 (Rp 32,4 miliar lebih) diduga ada kelebihan bayar sekitar Rp 565.553.334 (Rp 565 juta lebih). Ini jadi temuan setelah dilakukan pemeriksaan secara detail. Terutama dikaitkan dengan bukti fisik tiket Garuda Airlines dan harga dasar tiket.

Tak hanya itu pemeriksaan atas 4.982 lembar bukti tiket Garuda Indonesia, senilai Rp 10,4 miliar lebih pada 34 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) juga didapatkan selisih antara bukti fisik tiket sebanyak 933 lembar tiket dengan harga Rp 2,4 miliar lebih. Selain itu juga didapatkan adanya dugaan perjalanan dinas yang fiktif dengan nilai Rp 15 juta lebih. Perjalanan dinas fiktif ini ada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar, Dinas Perhubungan dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura.

Sebelumnya data dugaan kasus korupsi di Badung dan Denpasar masuk Kejari Denpasar. Data itu bersumber dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI Wilayah Bali, untuk hasil audit tahun 2013 yang diserahkan tahun 2014. Hasil audit tersebut bernomor 03.A/LHP/ XIX.DPS/05/2014 tertanggal 28 Mei 2014, yang ditandatangani penanggung jawab pemeriksaan Arman Syifa, M. Acc, AK. Ada dua jenis hasil audit dan penyimpangan - penyimpangan di pemerintahan yang dipimpin oleh Paket Rai Mantra - Jayanegara ini.

Yang pertama adalah hasil pemeriksaan sistem pengendalian internal. Penyimpangan meliputi Pencatatan Penerimaan dan Penyetoran Pejak dan PFK (Penghitungan Fihak Ketiga) tahun 2013 tidak tertibRp 39 miliar lebih. Kedua Penganggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal sebesar Rp 45 miliar lebih tidak sesuai ketentuan. Penataan Aset tidak tertib, barang Rp 6,8 miliar tidak diketahui keberadaannya. Penerapan Pencatatan Aset tetap belum optimalRp 35,5 miliar lebih masih ditelusuri.

Sedangkan untuk audit Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang - Undangan, penyimpangannya meliputi Pengelolaan upah pegawai non PNS di DKP Denpasar tidak sesuai ketentuan. Sebab masuk rekening pribadiRp 954 juta lebih. Penyertaan modal di PD Pasar Rp 14,9 miliar lebih dan PD ParkirRp 3,3 miliar lebih belum ditertibkan. 34 kelompok masyarakat dan organisasi penerima hibah belum menyampaikan laporan dana hibah dengan nilai Rp 1,3 miliar. Validasi piutang pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pengalihan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama belum sepenuhnya dilaksanakan Rp 176,4 miliar lebih. Pengelolaan Pajak Reklame di Pemkot Denpasar belum optimal Rp 9,2 miliar lebih. Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemkot Denpasar Belum Didukung Bukti yang memadaiRp 32,4 miliar lebih.

Sedangkan untuk Badung, ada beberapa data yang terkumpul. Misalnya penyimpangan di Dispenda, terkait pemungutan pajak. Ada beberapa objek pajak yang ditelusuri kasusnya. Kemudian ada kasus dan BBM yang sudah sempat mengemuka dulu, namun baru ditangani. Dan ada kasus dugaan dana persembahyangan di Pura Gunung Salak yang dikorupsi oleh pimpinannya. (art/yes)

hal. 4

Edisi : Selasa, 31 Maret 2015

Hal : 21 dan 31



Pemerintah Diminta Tak Kakas-kekes

Soal Rencana Penataan Eks Galian C

SEMARAPURA - Rencana Pemkab Klungkung melakukan menata lahan eks Galian C di wilayah Desa Gunaksa, Desa Sampalan Klod (Kecamatan Dawan), Desa Tangkas, dan Jumpai (Kecamatan Klungkung), mendapat lampu hijau dari sejumlah masyarakat selaku pemilik lahan di sana. Hal tersebut, seperti terlihat saat sosialisasi terhadap pemilik lahan di Desa Gunaksa, yang digelar di balai masyarakat Desa Gunaksa, Senin (30/3) kemarin.

Hanya saja, sosialisasi yang dihadiri Buati Klungkung, Nyoman Suwirta dan Wakilnya, Made Kasta, serta pejabat yang tergabung ke dalam Tim Penataan EKs Galian C, sejumlah pemilik lahan meminta Pemkab Klungkung yang

sudah membentuk tim, serius melakukan penataan lahan yang sudah lama tak produktif, itu. Pemerintah diminta tidak menganggap masyarakat seperti anak kecil. "Pemerintah harus serius. *De care siap gagadan. Kakas*-kekes," pinta warga Nengah Radiarta.

Warga lainnya, Wayan Sarka juga mengingatkan demikian. Apalagi, rencana pemerintah menata lahan itu menjadi daerah pariwisata. Jangan sampai, tegas dia, seperti pariwisata di Nusa Penida, Klungkung. Hanyakarena Dermaga Klungkung tak kunjung selesai. Akhirnya malah dinikmati di Sanur (Denpasar), dan Padangbai (Karangasem), yang memiliki jalur penyeberangan ke Nusa Penida.

Saat melakukan pendataan pemilik lahan, Pemkab Klungkung, juga mesti hati-hati. Pengukuran, dan batas-batas kepemilikan lahan harus jelas. Karena riskan menimbulkan konflik di masyarakat. Nengah Wija, asal warga Desa Tangkas, juga meningatkan, supayaa rencana pentaan eks Galian C tidak sekadar hiasan bibir.

"Pemilik lahan supaya benar-benar menikmati kepemilikannya," tegas dia.

Saat sosialisasi kemarin, Suwirta mengatakan, lahan eks Galian C banyak dilirik investor. Bahkan, banyak investor yang mengklaim sudah memiliki lahan di lokasi eks Galian C. Jika dihitung, luas total lahan yang diklaim investor mencapai 1000 hektare. Padahal, lahan sebenarnya hanya mencapai 350 hektare. Atas dasar itulah, pihaknya Pemkab Klungkung menganggap perlu

melakukan pendataan pemilik lahan. "Banyak klaim investor. Pemerintah tidak boleh membiarkan hal itu terjadi. itu harus segera ditata," tegas dia. Bupati Suwirta juga mengatakan, program pemerintah melakukan penataan, tidak mengajak masyarakat Klungkung menghayal. Bukan juga diajak melihat bintang di langit. "Ini serius. Ini kepentingan masyarakat, bukan pribadi saya," jelasnya. "Lahan (eks Galian C) tidur, harus segera ditata," imbuh Wakil Bupati Made Kasta. (wan/gup)

Edisi : Selasa, 31 Maret 2015

Hal : 25



TERMINAL MENGWI



SEPI: Meski sudah tiga tahun dioperasikan, Terminal Mengwi tetap sepi hingga kemarin.

Segera Ditarik Pusat

MANGUPURA - Mati segan hidup pun enggan. Begitulah kondisi Terminal Penumpang Mengwi. Setelah tiga tahun beroperasi, Terminal terbesar di Bali itu kondisinya memprihatinkan, bus AKAP dan AKDP enggan masuk. Tak pelak, bangunan megah dan fasilitas mewah nganggur begitu saja. Sampai saat ini, Terminal Mengwi yang statusnya tipe A kalah ramai dengan Terminal Ubung yang statusnya sudah turun menjadi tipe B. Kondisi Terminal Mengwi mati suri ini berpeluang besar ditarik atau diambil alih pemerintah pusat

▶ Baca Segera... Hal 31

hal. 1

: Selasa, 31 Maret 2015 **Edisi**

21 dan 31 Hal



sambungan.

Sudah Dirapatkan dengan Sekda

■ SEGERA...

Sambungan dari hal 21

Pasalnya, selain operasional tidak maksimal d ibawah Pemkab Badung, penarikan Terminal Mengwi juga disebut-sebut sebagai amanat undang-undang. Wacana penarikan Terminal Mengwi ke pusat bahkan dilontarkan langsung oleh Bupati Badung AA Gde Agung. Dikatakan Gde Agung, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, terminal tipe A akan dikelola langsung oleh

pemerintah pusat. Menurut Gde Agung, pengelolaan Terminal Mengwi selama ini tidak hanya dilakukan oleh Badung, tapi juga pemerintah provinsi. Pasalnya, terminal di Desa Mengwitani itu adalah terminal dengan status tipe A. "Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terminal tipe A Mengwi akan dikelola oleh pemerintah pusat," kata Gde Agung.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Badung, I Wayan Weda Dhar-

maja mengatakan, wacana penarikan Terminal Mengwi sudah dibahas dalam rapat yang dipimpin Sekkab Badung Kompyang R Swandika belum lama ini. Rapat secara khusus membahas ÚU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Salah satunya menyebutkan terminal tipe A akan dikelola pemerintah pusat. Pembahasan juga menyangkut masalah P3D. Yakni personal, peralatan, pembiayaan dan dokumen. "Ya kami di Badung sudah rapat dengan Pak Sekda untuk membahas masalah ini," papar Weda.

Saat ini Pemkab Badung sedang mendata aset-aset Badung yang ada di Terminal Mengwi. Menurut rencana, hasil pendataan aset ini akan diserahkan ke pusat pada bulan April mendatang. Mengenai status aset-aset Badung, pihaknya masih menunggu petunjuk pusat. "Yang jelas April kami serahkan datanya. Bagaimana keputusannya, lihat nanti. Ini bunyi undang-undang. Cuma PP (peraturan pemerintah-nya)belum ada," imbuh mantan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran ini. (san/yes)

hal.2

Edisi

: Selasa, 31 Maret 2015

Hal

: 21 dan 31